

**ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN PEMANDUAN DAN
PELAYANAN JASA PENUNDAAN KAPAL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2021**

TESIS

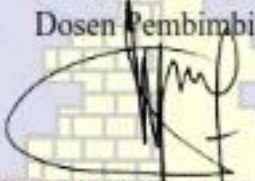
**ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN PEMANDUAN DAN
PELAYANAN JASA PENUNDAAN KAPAL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015**

Disusun oleh:

AGUS PRASETIYO
2019-02-001


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Februari 2021


Susunan Dewan Penguji
Dosen Pembimbing


Dr. Suparno, S.H., MS

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II


Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H


Dr. Sukresno, SH., M.Hum



Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 26-02-2021


Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Motto dan Persembahan

Motto :

Luruskan Niat dan Hilangkan Rasa Malas dalam Menuntut Ilmu.

“.....Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Al Mujadilah : 11)

“....Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan...” (Qs. Al-Baqoroh 2; ayat 220)

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang diberikan kepadaku;
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan restu kepadaku;
3. Teman-teman Magister Hukum Universitas Muria Kudus.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS PRASETIYO
NIM : 2019-02-001

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 18 Februari 2021
Yang membuat
pernyataan

AGUS PRASETIYO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015”, sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Magister (S.2) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengakui bahwa untuk mengumpulkan bahan, literature dan data yang berkaitan dengan tesis ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta bantuan beberapa pihak yang berupa tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus;
2. Dr. Iskandar Wibawa, SH., MHum., selaku Ketua Program Magister (S.2) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Dr. Suparno SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan serta petunjuk pada saat penulis menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S.2) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;

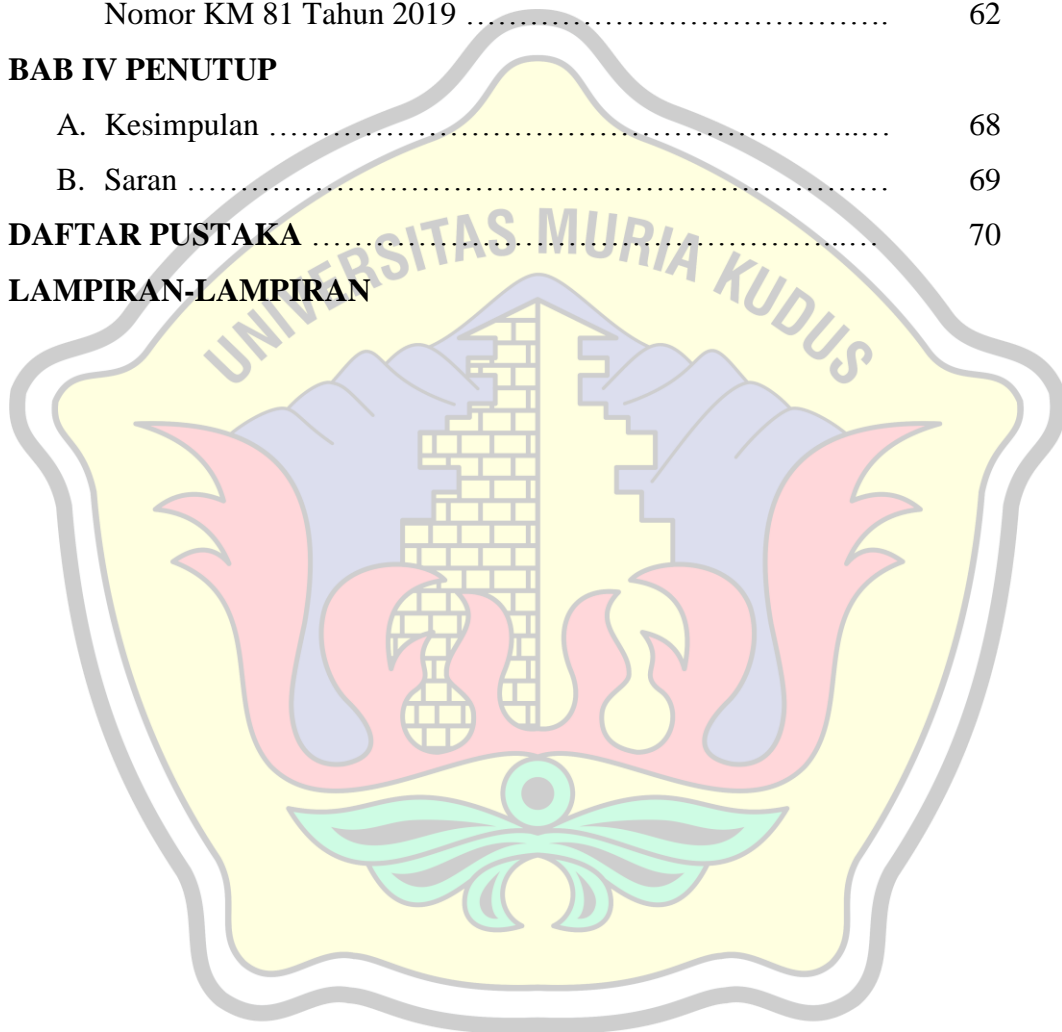
5. Staf Administrasi Program Magister (S.2) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister (S.2) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus; dan
7. Pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelesaian penulisan tesis ini.



DAFTAR ISI

Sampul Depan (Cover)	
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Moto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepelabuhan	19
1) Dasar Hukum	19
2) Pengertian	20
3) Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan	27
B. Tinjauan Umum Badan Usaha Pelabuhan	36
1) Dasar Hukum	36
2) Pengertian	37
3) Kewajiban	38
4) Persyaratan Badan Usaha Pelabuhan	44
C. Tinjauan Umum Unit Penyelenggara Pelabuhan	46
1) Fungsi Unit Pelayanan Pelabuhan	46

2) Tugas dan Tanggung jawab	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015	49
B. Koneksi Perjanjian Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Setelah Dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN PEMANDUAN DAN PELAYANAN
JASA PENUNDAAN KAPAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015**

Agus Prasetyo
Universitas Muria Kudus
prasetiyo4444@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 ini dilatar belakangi oleh pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal melalui konsesi perjanjian sebagaimana yang dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019 berakibat hukum mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab bagaimanakah pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 dan bagaimanakah konsesi perjanjian pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal setelah berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pengambilan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis serta menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 dengan pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Akan tetapi, belum ada peraturan dan/atau pelaksanaan teknis terkait proses konsesi baik melalui pelelangan dan/atau penugasan/penunjukan didalam peraturan perundang-undangan. Konsesi perijinan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal setelah dikeluarkannya Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019 berakibat dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012.

Kata Kunci : Pelimpahan, pemanduan dan penundaan kapal, konsesi.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE DELEGATION OF SCOUTING AND
SHIP DELAYING SERVICES ACCORDING TO GOVERNMENT
REGULATION OF THE REPUBLIK OF INDONESIA NUMBER 64 OF 2015**

Agus Prasetyo
Universitas Muria Kudus
prasetiyo4444@gmail.com

ABSTRACT

The research with the title Juridical Analysis of Delegation of Guidance and Delaying Services for Ship According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 64 of 2015 was motivated by the delegation of scouting and ship delaying services through concession agreements as issued by the Decree of the Minister of Transportation Number KM 81 of 2019 which resulted in the law repeal and The invalidation of the Decree of the Minister of Transportation Number KP 599 of 2012. This research was conducted with the aim of answering how the delegation of guidance and ship delay services according to Government Regulation Number 64 of 2015 and how is the concession of the scouting agreement and ship delaying services after the enactment of the Decree of the Minister of Transportation Number KM 81 of 2019.

The approach method used is juridical normative and data collection is carried out by literature study covering the provisions of applicable laws and regulations, documents and literature books related to research. This research is analytical descriptive and uses qualitative data analysis methods, namely quality data descriptions in the form of regular, sequential, logical and non-overlapping sentences.

From the results of this research it can be seen that the delegation of guidance and ship delay services according to Government Regulation Number 64 of 2015 is by granting concessions to Port Business Entities through an auction mechanism or through assignments as outlined in the form of an agreement. The concession agreement for the scouting and delaying service of ships after the enactment of the Decree of the Minister of Transportation Number KM 81 of 2019 revoked the Decree of the Minister of Transportation KP 599 of 2012 and made the appointment / assignment unilaterally by issuing the Decree of the Director General of Sea Transportation Number KP 471 / DJPL / 2019.

Keywords: *Transfer, guidance and delay of ships, concessions.*